Jurnal Sejarah Indonesia
ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564)
Volume 9 Nomor 2 2026
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi

Warisan dari Perspektif Kritis Kolonialitas, Dekolonialitas dan Epistemologi-Epistemologi dari Negara-Negara Selatan[1]

Wendy Alejandra Medina de Loera[1,2,3*]

[1]CEAA, El Colegio de México, México
[2]Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Indonesia
[3]IIAS, Leiden University, Belanda
Email: wamedina@colmex.mx

[*]Korespondensi

Received: 05-07-2026, Revised: 08-11-2026, Accepted: 09-11-2026, Published: 30-11-2026

Abstrak

Dalam artikel ini, saya menguraikan konsep-konsep "Kolonialitas Kekuasaan", "Kolonialitas Pengetahuan", "Dekolonialitas", dan "Epistemologi-Epistemologi dari negara-negara Selatan", sebagaimana dikemukakan oleh Aníbal Quijano, Walter Mignolo, dan Boaventura de Sousa Santos, dengan tujuan memicu perdebatan kritis mengenai warisan di Indonesia. Mengikuti pemikiran dekolonial para penulis ini, di artikel ini saya menggunakan istilah "warisan" dalam bahasa Indonesia untuk menghindari penggunaan istilah heritage dalam bahasa Inggris, yang merupakan istilah khas pemikiran kolonial. Argumen saya adalah bahwa dalam pengelolaan warisan serta praktik para ahli, profesional, dan pengelola warisan—termasuk para sejarawan—terdapat masalah-masalah kolonialitas yang tersirat. Saya juga mengemukakan bahwa pemikiran dekolonial berguna untuk merefleksikan masalah-masalah ini, merenungkan dan membayangkan solusi, serta menanganinya. Melalui artikel ini, saya berupaya berkontribusi untuk membuka ruang diskusi mengenai cara di mana gagasan para penulis ini dapat membantu kita untuk merefleksikan dan mempertanyakan cara di mana akademisi dan pakar warisan memahami, mendekati, dan mendefinisikan apa saja yang diberi status warisan. Selain itu, saya berupaya memicu refleksi pribadi dan kolektif mengenai peran yang dimainkan oleh akademisi dan profesional dalam politik warisan. Terakhir, tujuan saya adalah agar artikel ini berfungsi sebagai teks pengantar untuk karya-karya Quijano, Mignolo, dan de Sousa Santos, serta untuk perdebatan mengenai kolonialitas dan dekolonialitas secara umum.

Kata Kunci: Warisan; Kolonialitas; Dekolonialitas; Epistemologi- Epistemologi dari Negara-Negara Selatan, Amerika Latin

Abstract

In this article, I discuss the concepts of "Coloniality of Power", "Coloniality of Knowledge", "Decoloniality", and "Epistemologies of the South", as proposed by Aníbal Quijano, Walter Mignolo, and Boaventura de Sousa Santos, with the aim of sparking critical debates about

[1] Pernyataan mengenai penggunaan bahasa Spanyol dalam artikel ini: Saya adalah penutur bahasa Spanyol, dan meskipun akar bahasa ini berasal dari masa kolonial, masyarakat-masyarakat di Meksiko telah mengadopsinya dengan menambahkan unsur-unsur khas. Dalam proses persiapan artikel ini, saya telah mengambil keputusan dekolonial, dalam arti bahwa, kecuali pada abstrak dan istilah-istilah bahasa Inggris yang digunakan dalam bahasa Indonesia, saya tidak menggunakan bahasa Inggris—sebagai bahasa hegemonik dan imperial—untuk menjembatani komunikasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Spanyol. Terutama karena sebagian karya aslinya dari dua di antara tiga penulis yang menjadi rujukan saya dalam artikel ini ditulis dalam bahasa Spanyol.

heritage in Indonesia. I argue that issues of coloniality are implicit in heritage management and in the practices of heritage experts, professionals, and managers—including historians. I also contend that decolonial thought is useful for reflecting on these issues, for conceiving and imagining solutions, and for addressing them. With this article, I seek to contribute to open a space for debate on the ways in which these authors' ideas can help us to reflect on and question how scholars and heritage experts understand, approach, and define what is granted heritage status. I also aim to provoke individual and collective reflections on the role that scholars and professionals play in the politics of heritage. Finally, my intention is for this article to serve as an introductory text to the works of Quijano, Mignolo, and de Sousa Santos, as well as to the debates on coloniality and decoloniality more broadly.

Keywords: Heritage; Coloniality; Decoloniality, Epistemologies of the South, Latin America

Resumen

En este artículo, expongo los conceptos de *Colonialidad del Poder*, *Colonialidad del Saber*, *Decolonialidad* y *Epistemologías del Sur*, tal y como los proponen Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Boaventura de Sousa Santos, con el objetivo de provocar debates críticos sobre el patrimonio en Indonesia. Argumento que en la gestión del patrimonio y las prácticas de los expertos, profesionales y gestores del patrimonio —incluidos los historiadores— hay problemas de colonialidad implícitos. También sostengo que el pensamiento decolonial resulta útil para reflexionar sobre estos problemas, para pensar e imaginar soluciones y para atenderlos. Con este artículo, busco contribuir a abrir un espacio de debate sobre las maneras en que las ideas de estos autores pueden ayudarnos a reflexionar y cuestionar las formas en que académicos y expertos en patrimonio entienden, se aproximan y definen aquello a lo que se le otorga el estatus de patrimonio. Pretendo, además, provocar reflexiones a nivel individual y colectivo sobre el papel que los académicos y los profesionales desempeñan en la política del patrimonio. Por último, mi intención es que este artículo sirva de texto introductorio a las obras de Quijano, Mignolo y de Sousa Santos, así como a los debates sobre la colonialidad y la decolonialidad en general.

Palabras clave: patrimonio; colonialidad; decolonialidad; epistemologías del Sur; América Latina

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Gagasan klasik mengenai warisan[2] dan pengelolaannya bersifat eurosentris dan berakar pada kolonialisme dan modernitas Barat. Secara historis, warisan dan pengelolaannya dibangun dari sudut pandang Barat yang menetapkan hierarki mengenai apa saja yang harus dilestarikan berdasarkan gagasan Barat tentang apa yang "layak" dilestarikan. Dalam konteks ini, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO, singkatan dalam bahasa Inggris), yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua, merupakan perwujudan dari kriteria dan prinsip-prinsip Barat terkait warisan. Namun, seiring berjalannya

[2] Saya menggunakan istilah "warisan" untuk merujuk pada unsur-unsur budaya, sejarah, sosial, dan alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap berharga karena hubungannya dengan identitas, sejarah dan budaya suatu atau beberapa kelompok sosial. Dengan kata lain, yang saya maksud adalah warisan budaya benda, warisan budaya takbenda dan warisan alam. Saya menggunakan istilah "warisan" dalam bahasa Indonesia sebagai sinonim dari "heritage" dalam bahasa Inggris dan dari "patrimonio" dalam bahasa Spanyol.

waktu, telah muncul berbagai perspektif kritis terhadap pandangan klasik tentang warisan dan pengelolaannya yang bertujuan untuk mendemokratisasinya, yaitu membuka ruang bagi suara, pengetahuan, dan ingatan yang beragam dalam proses pengelolaan warisan termasuk memberi status warisan kepada benda dan tindakan/praktik. Perspektif-perspektif kritis terhadap pandangan klasik tentang warisan juga bertujuan untuk memperluas wawasan kita tentangnya sehingga warisan tidak hanya dilihat sebagai peninggalan masa lalu yang statis, melainkan sebagai sesuatu yang masih digunakan (warisan hidup) dan bersifat dinamis karena terus berubah supaya disesuaikan dengan masa kini (Karlström, 2015).

Dalam artikel ini, saya memaparkan konsep "Kolonialitas Kekuasaan" (*Colonialidad del Poder*), "Kolonialitas Pengetahuan" (*Colonialidad del Saber*), "Dekolonialitas" (*Decolonialidad*) dan "Epistemologi-Epistemologi dari negara-negara Selatan" (*Epistemologías del Sur*) sebagaimana diusulkan oleh Aníbal Quijano (2000), Walter Mignolo (2008, 2010) dan Boaventura de Sousa Santos (2022). Selain itu, saya mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan topik "warisan". Argumen saya adalah bahwa pemikiran Aníbal Quijano, Walter Mignolo dan Boaventura de Sousa Santos berguna untuk 1) merenungkan masalah kolonialitas yang tersirat pada warisan, pengelolaan warisan dan praktik pakar/ahli/profesional/pengelola warisan[3] termasuk sejarawan, dan 2) memikirkan serta membayangkan solusi atas masalah tersebut.

Untuk tujuan saya dalam artikel ini, saya mempertemukan ketiga penulis tersebut dalam sebuah diskusi. Di satu sisi, saya memaparkan beberapa gagasan dari teks karya Quijano yang berjudul "*Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina"* (Kolonialitas kekuasaan, eurosentrisme dan Amerika Latin) karena pada tulisan ini Quijano (2000) mengemukakan masalah kolonialitas kekuasaan dan pengetahuan dan mendalami masalah keberlangsungan dan berfungsinya sistem dominasi yang diterapkan selama masa kolonialisme Eropa. Di sisi lain, saya berfokus pada beberapa gagasan Mignolo (2008, 2010) dan de Sousa Santos (2022) karena mereka pernah mengusulkan sebuah solusi atas masalah kolonialitas, yaitu dekolonialitas. Penting untuk diperjelas bahwa Aníbal Quijano, dalam mengemukakan gagasannya mengenai masalah kolonialitas, juga mengusulkan dekolonialitas sebagai solusinya. Gagasan-gagasan Quijano kemudian diangkat kembali dan dikembangkan oleh Mignolo.

Diharapkan pembahasan di artikel ini membantu membuka ruang diskusi tentang cara dari gagasan Aníbal Quijano, Walter Mignolo dan Boaventura de Sousa Santos bisa membantu kita untuk merefleksikan dan mempertanyakan cara kita akademisi[4] dan ahli warisan memahami dan mendekati yang disebut sebagai "warisan" dan/atau diberikan status tersebut. Selain itu, diharapkan diskusinya memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran tentang politik warisan, yaitu aspek-aspek politik yang terlibat dalam proses penilaian dan penetapan sesuatu sebagai warisan. Tujuannya adalah agar kita merenung peran yang kita para akademisi dan profesional warisan mainkan di politik warisan. Diharapkan gagasan

[3] Yang saya maksud dengan "pakar, ahli, profesional dan pengelola warisan" adalah profesional yang bertugas melestarikan, merawat dan/atau mengkaji warisan. Saya menggunakan ketiga kata benda tersebut secara bergantian di sepanjang artikel ini.

[4] Saya menggunakan kata ganti "kita" saat membicarakan tentang dunia akademis karena saya menganggap diri sebagai seorang akademisi.

yang dipaparkan dapat memicu refleksi diri dan refleksi kelompok serta diskusi lebih lanjut di bidang akademisi dan pengelolaan warisan. Terakhir, diharapkan artikel ini dapat berfungsi sebagai teks pengantar untuk karya Quijano, Mignolo dan de Sousa Santos dan untuk diskusi-diskusi mengenai kolonialitas dan dekolonialitas secara umum. Di bagian akhir artikel ini, setelah daftar pustaka, saya telah menyertakan daftar bacaan yang direkomendasikan—dari beberapa penulis yang juga telah menulis mengenai topik ini.

Saya menyadari bahwa Aníbal Quijano, Walter Mignolo, dan Boaventura de Sousa Santos mengembangkan gagasan mereka dengan fokus pada pengalaman negara-negara yang ada di Amerika Latin. Namun, yang mereka pernah gambarkan dan usulkan tidak terbatas pada wilayah dunia yang itu. Kolonialisme Eropa merupakan pengalaman yang pernah dialami bersama oleh negara-negara Selatan, terlepas dari perbedaan jenis dan bentuk penjajahan. Selain itu, warisan kolonialisme Eropa dalam masyarakat pascakolonial terlihat dalam berbagai proyek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terus menerus dipromosikan oleh para elit dari sudut pandang eurosentris. Karena itu, dan tanpa melupakan bahwa semua pengetahuan perlu ditempatkan atau dilokalkan, gagasan Quijano, Mignolo dan de Sousa Santos berpotensi digunakan untuk menganalisis tempat mana pun di negara-negara Selatan.

Saya menyadari adanya perbedaan antara pengalaman kolonial Eropa di negara-negara Amerika Latin dan di Indonesia. Misalnya, di Amerika Latin, masyarakat yang dijajah dipaksa untuk mempelajari dua aspek utama budaya Eropa: agama para penjajah dan bahasa-bahasa mereka. Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan ini dan perbedaan periode kolonialisasi Eropa di kedua wilayah tersebut, sejak kemerdekaan mereka, para elit di Amerika Latin dan Indonesia telah berupaya meniru model Eropa dalam hal organisasi politik dan pemerintahan, di antara hal-hal lainnya. Dalam hal ini, Amerika Latin dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal adanya elit (dan masyarakat) yang masih memiliki pola pikir yang terkolonisasi (*mente colonizada*).

Saya menegaskan bahwa mengurai istilah Kolonialitas Kekuasaan, Kolonialitas Pengetahuan, Dekolonialitas dan Epistemologi-Epistemologi dari negara-negara Selatan dan menggabungkannya dapat bermanfaat untuk empat hal utama yaitu:1) untuk menyadari sistem-sistem dominasi yang terus berlanjut dalam masyarakat pascakolonial kita;[5] 2) untuk merenungkan dan mempertanyakan peran kita, sebagai akademisi, dalam mempertahankan sistem-sistem dominasi tersebut; 3) untuk menyadari bagaimana sistem-sistem dominasi tersebut membentuk pemahaman dan pendekatan kita terhadap warisan; dan 4) untuk memikirkan cara untuk melepaskan diri (*desprenderse*)[6] dari sistem-sistem dominasi tersebut (*matriz colonial de poder*).

Artikel ini dibagi menjadi delapan bagian. Pertama, bagian metodologi. Setelahnya, dua bagian di mana saya memaparkan beberapa gagasan Aníbal Quijano mengenai Kolonialitas Kekuasaan dan Kolonialitas Pengetahuan. Teori Quijano membantu kita untuk mengungkap permasalahan yang berada di pusat masyarakat pascakolonial, yaitu berlanjutnya sistem dominasi yang diciptakan selama

[5] Saya menggunakan kata ganti "kita" karena saya asli masyarakat yang juga pascakolonial, yaitu Meksiko.

[6] Konsep ini dijelaskan nanti pada bagian ke-5, yang berjudul "Dekolonialitas".

kolonialisme Eropa. Sistem dominasi itu berlandaskan pada penciptaan gagasan tentang ras, pembentukan tatanan hierarki rasial, serta pembagian hierarki rasial atas pengetahuan dan praktik budaya. Setelah memaparkan masalah tersebut, pada bagian keempat saya membahas hubunganya antara konsep-konsep yang dikemukakan oleh Quijano dan bidang warisan. Pada bagian berikut saya berfokus pada peran yang dimainkan para akademisi dalam bidang warisan dan pengelolaannya. Kemudian, saya menyajikan gagasan Mignolo mengenai Dekolonialitas, sebagai solusi atas masalah kolonialitas. Terakhir, sebelum saya menyajikan refleksi akhir, saya memaparkan gagasan de Sousa Santos mengenai Epistemologi-Epistemologi dari negara-negara Selatan, yang juga merupakan bagian dari solusi atas masalah kolonialitas. Sepanjang artikelnya, saya memusatkan perhatian saya pada pentingnya konsep-konsep yang diusulkan oleh Quijano, Mignolo dan de Sousa Santos bagi warisan dan pengelolaannya di masyarakat pascakolonial kita serta peran akademisi dan pakar di bidang warisan.

Untuk artikel ini, saya telah merujuk pada karya-karya Quijano, Mignolo dan de Sousa Santos yang diterbitkan dalam bahasa Spanyol, yang merupakan bahasa ibu saya. Terjemahan konsep-konsep dan kutipan langsung dari bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia telah dibuat oleh saya sendiri.

Metode

Artikel ini merupakan studi kualitatif di mana saya telah menelaah dan menganalisis sumber-sumber ilmiah sekunder. Sumber utama penelitian berupa karya-karya Aníbal Quijano (2000), Walter Mignolo (2008, 2010), dan Boaventura de Sousa Santos (2022). Sumber utama tersebut merupakan sebagian dari kerangka konseptual dan teoretis yang telah dikembangkan ketiga penulis tersebut sepanjang karier mereka. Saya berfokus pada beberapa kontribusi konseptual utama mereka terhadap teori dekolonial, yaitu kolonialitas kekuasaan, kolonialitas pengetahuan, dekolonialitas, dan epistemologi-epistemologi dari negara-negara Selatan. Karya-karya Quijano, Mignolo, dan de Sousa Santos dilengkapi dengan sebuah artikel mengenai *critical heritage studies* dan dengan analisis daftar Situs Warisan Budaya Dunia dan Situs Warisan Alam Dunia UNESCO.

Studi ini dilakukan melalui analisis konseptual dengan tiga tahapan. Pertama, karya-karya utama Quijano, Mignolo, dan de Sousa Santos dianalisis untuk mengidentifikasi konsep yang pernah mereka usulkan dan yang, menurut saya, berguna dan memiliki daya penjelasan untuk memahami politik warisan di masyarakat-masyarakat pascakolonial, dengan fokus khusus pada Indonesia kontemporer. Kedua, kontribusi konseptual utama ketiga pemikir dipilih dan dipertemukan dalam sebuah dialog. Ketiga, dialog tersebut digunakan sebagai perangkat kritis untuk; 1) menganalisis hubungan antara kolonialisme, ras, eurosentrisme, dominasi epistemologi Barat, posisi beberapa jenis pengetahuan, akademisi, bidang warisan dan pengelolaanya, dan dekolonialitas; dan 2) untuk menyajikan solusi yang diusulkan ketiga penulis sehingga analisis ini berakhir dengan cara yang penuh harapan dan konstruktif, bukan dengan cara yang melumpuhkan.

Dengan demikian, artikel ini bersifat eksplanatori, reflektif, dan propositif. Tulisan ini bersifat eksplanatori karena saya mengkaji beberapa konsep utama yang dikemukakan oleh ketiga penulis tersebut. Artikelnya bersifat reflektif karena saya

merefleksikan relevansi kontribusi ketiga pemikir tersebut untuk memahami bagaimana pola pikir dan perilaku yang dipengaruhi kolonialisme telah mengakar kuat, tetap bertahan dan tetap membentuk pemahamannya tentang warisan, bidang warisan, dan pengelolaannya dalam masyarakat pascakolonial. Akhirnya, artikel ini bersifat propositif karena saya menyoroti praktik dan tindakan yang, menurut para penulis yang dianalisis, dibutuhkan untuk mengatasi masalah kolonialitas atau melepaskan diri darinya.

Hasil dan Pembahasan

Kolonialitas Kekuasaan (*Colonialidad del Poder*)

"Kolonialitas Kekuasaan" adalah konsep yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Aníbal Quijano, seorang intelektual asal Peru. Konsep ini menggambarkan sistem dominasi yang bermula dari kolonialisasi Eropa pada abad ke-15 di Amerika Latin dan masih tertanam kuat dalam masyarakat pascakolonial Amerika Latin melalui struktur hierarkis dan pola pikir dominasi. Menurut Quijano, sistem hierarki, pengetahuan dan budaya diciptakan di bawah kolonialitas kekuasaan dan terus membentuk masyarakat pascakolonial. Dengan gagasan-gasasan ini, ada beberapa pertanyaan awal bagi kita: sistem hierarki, sistem pengetahuan dan sistem budaya apa saja diciptakan di bawah sistem dominasi yang dimulai dengan kolonialisasi Eropa dan terus mengakar dalam masyarakat pascakolonial kita? Apa implikasi sistem-sistem dominasi ini bagi cara kita memahami dan mendekati warisan dan pengelolaannya?

Mengidentifikasi cara sistem dominasi yang diciptakan selama kolonialisme tetap bertahan dalam masyarakat kita merupakan langkah pertama untuk memahami cara-cara sistem tersebut terus membentuk; 1) pandangan kita mengenai warisan dan pengelolaannya; 2) hubungan yang kita bangun dengannya; dan 3) peran yang kita akademisi mainkan untuk memvalidasi dan/atau mengaburkan pengetahuan dan ontologi yang dihasilkan dan dipraktikkan di luar universitas dan pusat penelitian, yaitu di luar ruang-ruang yang diakui sebagai penghasil pengetahuan ilmiah.

Salah satu gagasan utama Aníbal Quijano (2000) adalah bahwa sistem dominasi yang dibangun oleh kolonialisme Eropa telah menciptakan, dan terus dipertahankan oleh gagasan tentang ras dan hierarki ras di mana para penjajah Eropa menempati posisi tertinggi dan masyarakat yang dijajah ditempatkan pada posisi inferior. Akibatnya, ciri-ciri fenotipik, pencapaian intelektual dan budaya penduduk yang dijajah juga ditempatkan pada posisi yang lebih rendah (Quijano, 2000). Bagi Quijano (2000), ras dan identitas rasial ditetapkan sebagai instrumen klasifikasi sosial masyarakat dan gagasan tentang ras merupakan cara untuk melegitimasi hubungan dominasi sosial yang dipaksakan oleh kolonialisme. Bagi Quijano (2000), seiring waktu "hubungan dominasi kolonial dinaturalisasi melalui penjelasan teoritis tentang ras" (hlm. 203) yang membantu menaturalisasi superioritas Eropa yang diduga serta membenarkan dan melegitimasi eksploitasi terhadap penduduk yang dijajah.

Dengan perluasan dominasi kolonial Eropa pada abad ke-18, kriteria klasifikasi sosial-rasial hierarkis yang di awalnya diterapkan di benoa Amerika nanti diterapkan pada penduduk di seluruh dunia (Quijano, 2000). Akibatnya, identitas-identitas sosial-rasial dan historis yang baru diciptakan di dunia: *indio* (penduduk

asli benoa Amerika), *mestizo* (orang yang berhasil dari campuran antara orang Eropa dan penduduk asli benoa Amerika), hitam (orang berkulit warna hitam), putih (orang berkulit warna putih), kuning (orang berkulit warna kuning), zaitun (orang berkulit warna zaitun) (Quijano, 2000). Menurut Aníbal Quijano, klasifikasi sosial yang bersifat rasis terhadap manusia dan hierarki ras yang ditetapkan selama kolonialisme terus berakar kuat dalam masyarakat pascakolonial kita.

Inferioritas rasial yang dilekatkan pada masyarakat yang dikolonisasi menyiratkan inferioritas mereka dalam sistem dominasi yang diciptakan pada masa kolonial Eropa. Misalnya, ras menjadi kriteria utama dalam pembagian kerja (Quijano, 2000). Jabatan paling rendah dan pekerjaan yang tidak dibayar dilakukan oleh orang-orang non-Eropa (Quijano, 2000). Selain itu, inferioritas rasial yang dilekatkan pada orang-orang yang dijajah juga menyiratkan bahwa orang Eropa menganggap penemuan-penemuan intelektual rakyat jajahan, sistem pengetahuan mereka, cara mereka untuk memahami dan menghasilkan pengetahuan, dan budaya dan praktik budaya mereka sebagai sesuatu yang inferior. Dengan demikian, sistem dominasi yang terbentuk selama kolonialisme Eropa juga melibatkan kolonialitas pengetahuan.

Kolonialitas Pengetahuan (*Colonialidad del Saber*)

Invensi ras sebagai kategori pengklasifikasi masyarakat, hierarkisasi masyarakat berdasarkan kriteria ras, dan keberhasilan Eropa Barat menjadi pusat sistem dunia modern juga menghasilkan "kolonialitas pengetahuan" adalah salah satu bentuk kolonialitas kekuasaan (Gómez, 2015). Kolonialitas pengetahuan mengacu pada pembentukan perspektif eurosentris mengenai pengetahuan dan pengukuhannya sebagai pandangannya hegemonik. Kolonialitas pengetahuan merupakan bagian dari sistem dominasi yang dibentuk selama masa kolonial Eropa dan terus menerus dalam masyarakat pascakolonial meskipun kehadiran kolonial Eropa di negara-negara Selatan telah berakhir.

Istilah "Kolonialitas Pengetahuan" muncul dalam buku yang disusun oleh Edgardo Lander (2000), di mana ada bab yang ditulis oleh Quijano dan saya gunakan untuk artikel ini.[7] Isu kolonialitas pengetahuan juga merupakan bagian dari diskusi-diskusi yang dilakukan Quijano dan para intelektual lainnya sebagai bagian dari proyek penelitian mereka yang bernama "modernitas/kolonialitas" (Mignolo, 2010).[8] Dalam artikel "*Colonialidad y Modernidad-racionalidad*" yang diterbitkan pada tahun 1989, Quijano "secara eksplisit mengaitkan kolonialitas kekuasaan di ranah politik dan ekonomi dengan kolonialitas pengetahuan" (Mignolo, 2010, hlm. 10-11) karena "pengendalian ekonomi dan otoritas bergantung pada landasan di mana pengetahuan [epistemologi], pemahaman [hermeneutika], dan perasaan [aesthesis] itu berakar" (Mignolo, 2010, hlm. 12).

Kolonialitas pengetahuan yang bermula dari kolonialisme Eropa telah ditandai oleh hegemoni budaya Eropa, hegemoni eurosentrisme, dan dominasi epistemologi

[7] Bukunya adalah: Lander, Edgardo (Peny.). (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas.* CLACSO. Bukunya tersedia di: https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=247&c=8

[8] Di antara para anggota proyek penelitian tersebut terdapat Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Edgardo Lander, Enrique Dussel, Catherine Walsh, Freya Schiwy, Arturo Escobar, dan Fernando Coronil.

Barat (yang didasarkan pada rasionalisme, empirisme, dan positivisme) dalam produksi pengetahuan. Para penjajah melakukan beberapa tindakan untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah penindasan cara-cara produksi pengetahuan masyarakat yang dijajah, dan represi dunia simbolik dan pola-pola ekspresi mereka (Quijano, 2000). Tindakan lainnya adalah memaksa masyarakat yang terjajah untuk mempelajari aspek-aspek budaya penjajah yang berguna untuk mempertahankan dan melanggengkan dominasi Eropa (Quijano, 2000). Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa "rasionalitas modern bersifat mendominasi, sekaligus defensif dan eksklusif" (Mignolo, 2010, hlm. 13).

Dalam proses meremehkan dan menindas pengetahuan lokal serta menempatkan budaya Eropa dan pengetahuan Eropa di puncak perkembangan sejarah, Eropa menciptakan gagasan bahwa modernitas dan rasionalitas adalah pengalaman dan hasil yang semata-mata berasal dari Eropa (Quijano, 2000). "Dari sudut pandang tersebut, hubungan antara Eropa Barat dan sisa dunia dikodifikasi ke dalam serangkaian kategori biner yang baru: Timur-Barat, primitif-beradab, magis/mitis-ilmiah, irasional-rasional, tradisional-modern" (Quijano, 2000, hlm. 211). Akibat jangka panjangnya adalah bahwa "keragaman perspektif kognitif, cara-cara memberi makna pada hasil pengalaman material, imajinasi, hubungan sosial, dan budaya telah dijajah" (Quijano, 2000, hlm. 210).

Dalam prosesnya, orang Eropa menciptakan perspektif temporal baru tentang sejarah, yaitu sejarah linier. Dalam sejarah yang linier itu, masyarakat yang dijajah ditempatkan di masa lalu dan Eropa (dan Barat) ditempatkan sebagai tujuan akhir yang seharusnya menjadi cita-cita masyarakat di dunia (Quijano, 2000). Hal ini melahirkan implikasi terhadap cara kita memahami sejarah dan cara kita tetap menganggap model Eropa dan Barat sebagai yang superior. Ini mencakup pengklasifikasian rasionalitas dan pengetahuan ilmiah sebagai yang lebih unggul daripada jenis pengetahuan dan cara produksi pengetahuan lainnya.

Menurut Quijano, sistem pengetahuan dan budaya yang diciptakan di bawah kolonialitas kekuasaan pada masa kolonial terus membentuk masyarakat pascakolonial kita. Dalam hal ini, kolonialitas pengetahuan tidak hanya terwujud dalam hubunganya antara masyarakat Barat dan masyarakat non-Barat. Melainkan, di dalam masyarakat pascakolonial, kolonialitas pengetahuan tetap terwujud, meskipun dalam bentuk-bentuk lain, yaitu antara pengetahuan ilmiah dan ahli dan pengetahuan non-ilmiah dan non-ahli (dalam bidang-bidang pengetahuan yang beragam seperti kesehatan, lingkungan, pangan, warisan, dan sebagainya).

Kolonialitas Kekuasaan, Kolonialitas Pengetahuan, dan Warisan

Setelah saya sampaikan gagasan-gagasan yang tadi, kita bisa mempertanyakan: apa implikasinya dari kolonialitas kekuasaan dan kolonialitas pengetahuan dalam konteks warisan? Bagaimana sistem dominasi yang dimulai pada masa kolonial Eropa dan masih berlanjut dalam masyarakat pascakolonial kita memengaruhi cara kita menghargai, memahami, dan mendekati warisan? Bagaimana semua hal ini mempengaruhi proses penetapan warisan dan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengelolanya?

Kolonialitas kekuasaan dan kolonialitas pengetahuan terlihat jelas dalam bidang warisan dan pengelolaannya. Secara historis, bidang ini ditandai oleh dominasi epistemologi Barat dan bias eurosentris. Di satu sisi, bidang warisan

memiliki akar yang dalam di Eropa; warisan merupakan sebuah invensi Eropa. Warisan milik negara di Eropa berasal dari harta benda yang disita dari kerajaan-kerajaan Eropa. Misalnya, Museum Prado di Spanyol lahir dari penggabungan koleksi lukisan dan karya seni yang dikumpulkan oleh para raja Spanyol selama beberapa abad. Dengan demikian, harta benda kerajaan berubah menjadi harta benda nasional dan telah digunakan untuk melegitimasi asal-usul negara modern. Dalam hal ini, warisan dan negara saling terkait dalam konteks Eropa, dan hal ini telah menjadi model yang diekspor ke negara-negara lain. Selain itu, dalam konteks nasionalisme dan pembentukan negara-bangsa di Eropa pada abad ke-19, upaya pendokumentasian, pemulihan, dan pelestarian bangunan dan benda yang dianggap bersejarah mulai dilakukan. Pada saat itu, tujuan politik dari tindakan-tindakan tersebut adalah menyatukan masyarakat melalui simbol-simbol identitas yang berasal dari masa lalu, menanamkan rasa cinta tanah air, dan melegitimasi kekuasaan negara.

Di sisi lain, kolonialitas pengetahuan yang masih tersirat dalam bidang warisan dan pengelolaannya bisa dilihat di tingkat kelembagaan dan nilai-nilai. UNESCO merupakan lembaga utama di dunia yang mempromosikan perlindungan dan pemulihan warisan. Tindakan-tindakan tersebut (perlindungan dan pemulihan), yang muncul dari kepentingan dan keprihatinan Eropa pada masa pasca-Perang Dunia II ketika Eropa telah hancur dan UNESCO didirikan, merupakan nilai-nilai dasar UNESCO. Melalui konvensi-konvensi UNESCO, seperti Konvensi Warisan Dunia 1972 dan Konvensi Warisan Budaya Takbenda 2003, Eropa/Barat telah menetapkan dan mempromosikan pandangan hegemonik mengenai warisan dan pengelolaannya.

Salah satu bias eurosentris dari UNESCO terlihat jelas dalam prioritasnya terhadap pelestarian dan keabadian bangunan. Dalam konteks ini, "penghancuran dan pelapukan masih umumnya dipandang sebagai ancaman bagi pelestarian warisan dan bertentangan dengannya" (Karlström, 2013, hlm. 396). Namun, sebagaimana didokumentasikan oleh Karlström (2013), "apresiasi terhadap bentuk-bentuk warisan budaya tertentu terkadang menyiratkan bahwa penghancuran itu diperlukan" (hlm. 396). Jadi, apa implikasi dari standar internasional bagi proses menilai dan mengakui warisan di masyarakat non-Barat, jika cara lokal untuk menilai warisan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh UNESCO? Kolonialitas pengetahuan yang berlandaskan rasisme terlihat jelas dalam cara hegemonik dan eurosentris untuk memahami dan mendefinisikan apa itu warisan.

Kecenderungan eurosentris lain dari UNESCO terlihat dalam prinsip "nilai universal luar biasa" (UNESCO, t.t.a). Prinsip tersebut menimbulkan ambiguitas mengenai bagaimana mendefinisikan atau mengukur signifikansi historis dan nilai sesuatu yang berpotensi dinyatakan sebagai warisan, terutama dalam konteks hubungan asimetris yang terbentuk secara historis antara Eropa/Barat dan masyarakat non-Eropa/non-Barat. Fakta bahwa hampir setengah dari jumlah Situs Warisan Dunia terletak di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan bahwa ambiguitas dalam prinsip "nilai universal luar biasa" bersifat bias dan, sekali lagi, telah menguntungkan Eropa/Barat.

Berdasarkan statistik daftar warisan dunia UNESCO (t.t.b), saat ini, Agustus 2026, dari 1.273 situs yang ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia, 588 (atau

46,19%) di antaranya terletak di Eropa dan Amerika Utara. Adapun dari total 991 Situs Warisan Budaya Dunia, 501 (atau 50,55%) berada di Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, dalam kategori Situs Warisan Alam Dunia, Eropa dan Amerika Utara tidak mendominasi, melainkan berbagi peringkat pertama dengan kawasan Asia dan Pasifik. Dari total 240 Situs Warisan Alam Dunia, 74 (atau 30,83%) berada di Eropa dan Amerika Utara, sedangkan 73 (atau 30,41%) terletak di Asia dan Pasifik. Apakah tingginya konsentrasi Situs Warisan Budaya Dunia di Eropa dan Amerika Utara bersifat netral? Atau apakah hal ini mengisyaratkan sesuatu mengenai pandangan eurosentris terhadap perkembangan budaya umat manusia?

Apa artinya hal ini bagi hubungan asimetris yang sudah ada antara Barat dan non-Barat, yang berakar pada diferensiasi rasial yang telah menopang sistem dominasi sejak masa kolonialisme Eropa? Kecenderungan eurosentris UNESCO dan hegemoni Barat yang dipromosikannya mereproduksi dan memperkuat kolonialitas kekuasaan dan pengetahuan karena mengesampingkan cara-cara non-Barat saat memahami dan berinteraksi dengan warisan. Apa yang akan terjadi jika, alih-alih menilai sesuatu berdasarkan standar Barat dinilai berdasarkan konteksnya sendiri? Berdasarkan nilai yang dimilikinya bagi konteks lokal dan sejarah lokal?

Standar universal yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi UNESCO kemudian diadopsi dalam perundang-undang nasional dan kerangka kelembaan. Dalam kasus Indonesia, kewajiban berdasarkan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi pernah dimasukkan ke dalam peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Dalam konteks ini, kita harus bertanya: sejauh mana para ahli warisan di masyarakat pascakolonial menjauh dari pandangan Barat untuk mendefinisikan apa itu warisan dan untuk apa kita membutuhkannya? Atau sejauh mana para pengelola warisan di negara-negara pascakolonial bercita-cita meniru Barat, bahkan dalam isu pemanfaatan warisan untuk kepentingan politik yang sama? Apakah hegemoni Barat tidak hanya terlihat jelas dalam cara memahami warisan, tetapi juga dalam penggunaannya?

Jadi, bagaimana kita mengidentifikasi kolonialitas kekuasaan dan kolonialitas pengetahuan yang tersirat dalam warisan dan pengelolaannya? Pertanyaan-pertanyaan yang berikut bisa membantu kita: Suara-suara mana yang didengarkan dan suara-suara mana yang diabaikan saat mengklasifikasikan artefak, dokumen, manuskrip, karya seni, pengetahuan, dan ritual sebagai warisan? Kepentingan apa dan milik siapa yang diutamakan, serta kepentingan apa dan milik siapa yang diabaikan dalam proses tersebut? Dalam konteks di mana gagasan klasik mengenai warisan berakar pada eurosentrisme dan kolonialisme, apa saja implikasinya dari kolonialitas kekuasaan dan pengetahuan bagi peran yang dimainkan oleh para akademisi dan universitas dalam pengelolaan warisan?

Akademisi dan Warisan

Para akademisi dan lembaga-lembaga penghasil pengetahuan ilmiah tempat mereka bekerja memainkan peran penting dalam proses memvalidasi dan/atau menginvalidasi status warisan suatu artefak, dokumen, praktik, dan sebagainya.

Mengapa? Universitas merupakan pewaris kolonialisme Eropa dan pemaksaan eurosentrisme. Selain itu, universitas merupakan perwujudan dari konsepsi-konsepsi eurosentris mengenai rasionalitas dan keunggulan pengetahuan ilmiah. Sebagai bagian dari sistem dominasi yang diterapkan selama kolonialisme Eropa, pengetahuan ahli para ilmuwan (termasuk ilmuwan sosial) telah ditempatkan di puncak hierarki yang mengkategorikan apa yang superior dan apa yang inferior. Dalam skala tersebut, pengetahuan ilmiah dianggap sebagai satu-satunya jenis pengetahuan yang sah.

Dengan turut serta dalam pengelolaan warisan, para akademisi memiliki kekuasaan dan menggunakannya karena pendapat mereka didukung oleh nilai yang secara historis dan eurosentris dilekatkan pada pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, pendapat mereka didengarkan dengan serius. Dalam hal ini, dalam pengelolaan warisan, para akademisi berisiko mengabaikan, membungkam, dan meminggirkan pengetahuan serta cara memahami dunia yang tidak didasarkan pada metode ilmiah. Akibatnya, mereka berisiko mengulangi/mereproduksi dan melanggengkan sistem dominasi yang diterapkan selama masa kolonialisasi Eropa. Dengan kata lain, mereka berisiko memperkuat, alih-alih melawan, struktur mendalam yang terus mengatur masyarakat pascakolonial: kolonialitas.

Dalam pengelolaan warisan, kolonialitas kekuasaan dan pengetahuan dapat terwujud, misalnya, dengan bentuk pemaksaan dari atas ke bawah—baik oleh pemerintah maupun lembaga akademis—terhadap satu set nilai dan prosedur yang mengutamakan pengetahuan ilmiah dan suara para ahli daripada pengetahuan dan suara masyarakat lokal (pengetahuan non-ilmiah). Selain itu, kolonialitas tersebut juga dapat terwujud melalui asumsi yang tidak dipertanyakan bahwa standar dan cara Barat adalah satu-satunya cara yang benar dan sah untuk menilai dan mengelola warisan.

Adakah jalan keluar dari kolonialitas kekuasaan dan kolonialitas pengetahuan sehingga kita akademisi berhenti mereproduksi sistem dominasi yang merupakan warisan kolonial? Adakah solusi atas kolonialitas kekuasaan dan kolonialitas pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan warisan dan pengelolaannya? Selanjutnya, akan saya jelaskan kontribusi Mignolo dan de Sousa Santos sebagai bahan refleksi dalam upaya kita di negara-negara Selatan untuk mencari solusi atas masalah tersebut.

Dekolonialitas (*Decolonialidad*)[9]

Pemikiran dekolonial Walter Mignolo menawarkan sebuah alternatif atau alternatif parsial sebagai jalan keluar dari kolonialitas, terutama bagi para sejarawan, arkeolog dan ilmuwan sosial lainnya yang sering terlibat dalam dinamika politik warisan dalam kapasitas mereka sebagai praktisi. Pemikiran dekolonial Mignolo merupakan sebuah pendekatan analitis yang kokoh untuk memikirkan kembali warisan karena kita diajak untuk mempertanyakan landasan-landasan

[9] Mignolo (2010, hlm. 8), dan de Sousa Santos (2022), mengingatkan kita bahwa "meskipun konseptualisasi pemikiran dekolonial masih tergolong baru, praktik-praktik dekolonial itu sendiri bermula di Amerika melalui pemikiran masyarakat adat dan Afro-Karibia, kemudian berlanjut di Afrika dan Asia dalam menghadapi kolonialisme Inggris dan Prancis, melalui gerakan-gerakan dekolonisasi, dan terus meluas hingga saat ini, sebagai respons aktif, di mana pun pola kekuasaan kolonial atau matriks kekuasaan kolonial sebagai mesin pembentukan batas-batas berakar".

Barat dan modernis yang masih mendominasi produksi pengetahuan. Selain itu, gagasan dekolonial Mignolo juga mengajak kita untuk membongkar kolonialitas pengetahuan dan menerapkan disidensi epistemik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks warisan, dekolonialitas berarti mengatasi kolonialitas kekuasaan dan kolonialitas pengetahuan dengan mengubah secara mendasar cara warisan dipahami, dihargai, dan dikelola.

Bagi Mignolo (2008), kolonialitas, selain merupakan sisi tersembunyi dari modernitas, juga merupakan energi yang melahirkan dekolonialitas. Pilihan dekolonial (*la opción descolonial*), atau proyek epistemik dekolonial, berakar pada upaya mendekolonisasi produksi pengetahuan dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan dekolonial. Dengan kata lain, pilihan dekolonial merupakan dekolonisasi epistemik, yaitu penghapusan cara-cara universal (atau cara tunggal) memandang, memahami, dan menjelaskan dunia, cara-cara yang telah meminggirkan, membungkam, dan mengaburkan "pengetahuan yang diperoleh dari epistemologi lain, prinsip-prinsip lain untuk mengetahui dan memahami, serta etika-etika lain" (Mignolo, 2010, hlm. 17).

Pilihan dekolonial, menurut Mignolo (2010), adalah "sebuah proyek pelepasan epistemik di ranah sosial (termasuk di lingkungan akademis yang merupakan salah satu dimensi dari ranah sosial)" (hlm. 15). Dalam pemikiran dekolonial, gagasan tentang pelepasan (*desprendimiento*) mengacu pada upaya memutus atau membebaskan diri secara epistemologis dari kolonialitas kekuasaan, retorika modernitas, dan rasionalitas eurosentris. Oleh karena itu, pilihan dekolonial terdiri dari melepaskan diri dari retorika modernitas yang melegitimasi model-model pemikiran (Mignolo, 2008), tetapi juga merupakan fenomena pengendalian pengetahuan (gagasan Quijano yang dikutip oleh Mignolo, 2010).

Menurut Mignolo (2010), pelepasan terdiri dari setidaknya dua proses. Salah satunya terjadi ketika "para aktor yang hidup dalam bahasa dan subjektivitas yang dirasialisasikan serta kemanusiaannya disangkal" (Mignolo, 2010, hlm. 112) menyadari keberpihakan dan keterbatasan paradigma epistemik hegemonik dan mengakui "bahwa kolonisasi pengetahuan dan keberadaan telah dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan imperial untuk menindas [mereka]" (Mignolo, 2010, hlm. 112). Proses lainnya adalah memutus dominasi dan eksklusivitas paradigma epistemik hegemonik dengan melepaskan diri dari kerangka yang mendominasi pengetahuan, dan menghasilkan pengetahuan dekolonial dari wilayah-wilayah, pengalaman-pengalaman dan tubuh-tubuh yang telah terpinggirkan oleh retorika modernitas, oleh kolonialitas (kekuasaan dan pengetahuan), dan oleh eurosentrisme. Dalam hal ini, terjadi sebuah pemutusan epistemik spasial yang disebut "geo-politik pengetahuan" (*geo-política del conocimiento*)[10] oleh Mignolo (2008). Geo-politik pengetahuan mengimplikasikan pembebasan kategori pemikiran, perspektif, dan cara hidup mereka yang secara historis direndahkan, dibungkam dan terpinggirkan oleh retorika modernitas dan kemajuan—retorika yang memiliki klaim universalistik dan totaliter, serta bersifat asimilatif dan

[10] Dalam tulisannya, Mignolo (2008) menjelaskan bahwa ia mengangkat kembali konsep "geo-politik pengetahuan" yang diperkenalkan oleh Enrique Dussel pada tahun 1977 dalam bukunya "*Filosofía de la Liberación*", bab "*Geopolítica y Filosofía*" (Buku "Filsafat Pembebasan", bab "Geopolitik dan Filsafat"). Bukunya Tersedia di:
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf

eksklusif. Misalnya, pemikiran dan suara-suara negara-negara Selatan, masyarakat adat Amerika, keturunan Afrika, orang Latin di Amerika Serikat, dan lain lain.

Geo-politik pengetahuan melibatkan lembaga-lembaga serta tubuh-tubuh (*cuerpos*) yang menghasilkan dan mentransformasi pengetahuan di dalam lembaga-lembaga tersebut (Mignolo, 2008). Dalam hal ini, pilihan kolonial berarti bahwa tubuh-tubuh tersebut, yang telah "dibentuk secara geo-politik [dibesarkan dalam lingkungan tertentu] dan diklasifikasikan secara etnis-rasial [didevaluasi secara hierarkis] oleh kolonialitas pengetahuan" (Mignolo, 2008, hlm. 15), "menghasilkan pengetahuan untuk mendekolonisasi pengetahuan dan keberadaan" (Mignolo, 2008, hlm. 16) serta "untuk membangun masyarakat yang terlepas dari negara modern dan ekonomi kapitalis" (Mignolo, 2008, hlm. 16). Mereka adalah tubuh-tubuh yang memanfaatkan disiplin ilmu mereka sebagai alat yang berguna untuk menangani masalah-masalah di lingkungan/konteks mereka, masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka, dan masalah-masalah yang mereka rasakan sebagai bagian dari diri mereka, seperti rasisme, kolonialitas, ketidaksetaraan, dan sebagainya (Mignolo, 2008). Dalam konteks ini, geo-politik pengetahuan berjalan seiring dengan "tubuh-politik pengetahuan" (*corpo-política del conocimiento*), sebuah konsep yang mengacu pada tubuh-tubuh yang menghasilkan dan mentransformasi pengetahuan dan yang telah dipengaruhi oleh kolonialitas kekuasaan. Dengan kata lain, *corpo-política del conocimiento* mengacu pada politik pengetahuan yang berkaitan dengan orang-orang/tubuh-tubuh yang memproduksi pengetahuan.

Dipandu oleh gagasan pelepasan, pilihan dekolonial mengupayakan pluriversalitas, atau universalitas-lain, sebagai alternatif "terhadap universalisme modern Barat yang berusaha menyamarkan provinsialismenya [ ] sebagai kebenaran itu sendiri" (Garbarino et al., 2024, hlm. 1). Pilihan dekolonial juga mengusulkan pluriversalitas sebagai sebuah proyek universal (Mignolo, 2010). Pluriversalitas terdiri dari "komunikasi antarbudaya yang baru, [ ] pertukaran pengalaman dan makna, sebagai dasar rasionalitas lain [ ]" (dikutip dalam Mignolo, 2008, hlm. 19). Ini bukan tentang menguniversalkan pengalaman masyarakat-masyarakat yang secara historis terpinggirkan oleh pengetahuan modernitas, melainkan tentang koeksistensi keragaman pengalaman, gagasan, dan harapan (sejarah-sejarah lokal) yang memiliki kesamaan "dalam kenyataan bahwa mereka harus menghadapi kehadiran tak terelakkan dunia modern/kolonial beserta perbedaan kekuasaannya, mulai dari klasifikasi rasial hingga klasifikasi planet" (Mignolo, 2010, hlm. 122). "Masa depan global tidak lagi dapat dirancang maupun diimplementasikan oleh suatu etno-kelas atau ideologi [ ], melainkan akan bersifat antar-epistemik, dialogis, dan pluri-versal" (Mignolo, 2010, hlm. 125).

Metode pilihan dekolonial adalah "pemikiran perbatasan" (*pensamiento fronterizo*). Pemikiran perbatasan muncul dari pengalaman penghinaan dan marginalisasi (Mignolo, 2010) dan dari upaya untuk mengaktifkan—dengan tujuan mendekolonisasi pengetahuan dan keberadaan serta melepaskan diri dari modernitas imperial—bahasa dan kategori pemikiran yang selama ini telah disubordinasikan (Mignolo, 2010). Pemikiran perbatasan merupakan alat kritis perlawanan dalam pemikiran dan tindakan. Selain pemikiran perbatasan dapat menjadi motor utama proyek dekolonial (Mignolo, 2010), ia juga dapat membantu menghubungkan "pluri-versitas (berbagai sejarah kolonial yang terperangkap

dalam modernitas imperial) dengan proyek universal untuk melepaskan diri dari [subordinasi] imperial, dari retorika modernitas dan dari logika kolonialitas, serta membangun dunia-dunia lain yang mungkin di mana tidak ada lagi pemimpin dunia" (Mignolo, 2010, hlm. 122), di mana tidak ada lagi pemikiran tunggal.

Bagi Mignolo (2008), pilihan dekolonial semakin menjadi lebih populer dan diterima. Terhadap pilihan-pilihan apa saja pilihan dekolonial ini semakin lebih populer? Pilihan dekolonial muncul sebagai alternatif terhadap pilihan disiplin-disiplin ilmu yang "berorientasi pada mempromosikan dan melanjutkan 'proyek modernitas yang belum selesai'" (Mignolo, 2008, hlm. 14). Dalam hal ini, kata Mignolo (2008), pilihan dekolonial bersifat *indisciplinada*, yaitu tidak berkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu dan tidak disiplin. Dan hal itu bukan karena menolak atau mengabaikan disiplin-disiplin tersebut, melainkan karena secara terus-menerus mengungkap keterlibatan antara formasi-formasi disiplin dan matriks kolonial kekuasaan (Mignolo, 2008). Opsi dekolonial berdialog dengan pengetahuan modernitas, namun melakukannya dari posisi yang terlepas dari matriks kolonial kekuasaan dan dari sana menantangnya. Pilihan dekolonial tidak mengabaikan platform Eropa, namun juga tidak menyesuaikan diri dengannya (Mignolo, 2008). Pilihan deskolonial "berupaya untuk mengacaukan dan mengarahkan kembali disiplin-disiplin ilmu menuju visi non-imperialis/kolonial dan non-kapitalis dalam produksi pengetahuan" (Mignolo, 2008, hlm. 14). "Pilihan dekolonial juga merupakan pilihan di hadapan pilihan-pilihan kritis lainnya yang ada—baik epistemologis maupun politis—seperti pemikiran Pascamodernis, pemikiran Marxis, atau pemikiran Teologi Pembebasan" (Mignolo, 2008, hlm. 15). Namun, pilihan dekolonial tidak bertentangan dengan pilihan-pilihan tersebut, dan juga tidak bertujuan untuk menjadi "solusi universal" karena jika "berpikir dengan cara seperti itu berarti tetap berada dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh modernitas" (Mignolo, 2008, hlm. 15). Perlu diingat, pilihan dekolonial mengupayakan pluriversalitas.

Apa arti pilihan dekolonial dalam bidang warisan dan pengelolaannya? Dan bagaimana cara menerapkan pilihan dekolonial tersebut? Pilihan dekolonial berarti, pertama-tama, menyadari sifat provinsialisme dan keterbatasan yang dimiliki kerangka "universal" (Eropa-Barat) modernitas untuk mendefinisikan, menilai, memahami, dan bertindak terhadap sesuatu yang berpotensi dinyatakan sebagai warisan alam dan/atau warisan budaya, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Langkah kedua adalah memutus dominasi/melepaskan diri dari dominasi paradigma epistemik hegemonik.

Bagaimana cara melepaskan diri dari dominasi paradigma epistemologis hegemonik? Melalui dua langkah. Yang pertama adalah melepaskan diri dari logika Barat yang bersifat eurosentris dan membungkam logika-logika lain. Yang kedua adalah mengembangkan logika-praktik lain dan/atau menghidupkan kembali logika-praktik masa lalu yang tidak sepenuhnya luput dari retorika modernitas, kolonialitas, dan eurosentrisme, tetapi "kekuatan yang mendorong dan membimbing [logika-praktik tersebut] bukanlah akal Pencerahan modernitas, melainkan sisa-sisa kenangan, sejarah, pengetahuan, ucapan, perbuatan, perasaan, dan keyakinan yang tidak pernah dapat dihapus oleh modernitas selama lebih dari lima abad upaya meminggirkan dan menghapusnya" (Gómez, 2015, hlm. 10). Logika-praktik itu akan menjadi kategori pemikiran dan praktik dekolonial "sejauh

mereka mencari akar di bagian dunia yang milik mereka sendiri dan sejauh mereka tidak melalui pusat modernitas Eropa-Amerika untuk divalidasi dan diproyeksi" (Gómez, 2015, hlm. 10).

Dalam konteks warisan dan pengelolaannya, salah satu praktik dekolonial yang menjadi prioritas adalah mendefinisikan—dari pengalaman, gagasan, dan harapan kita sendiri—apa yang kita maksud dengan warisan, hubungan seperti apa yang akan kita bangun dengannya, serta siapa saja yang akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini. Kita bahkan mungkin bisa memulainya dengan bertanya pada diri sendiri apakah kita seharusnya meninggalkan gagasan dan/atau konsep warisan. Apa yang akan kita ciptakan sebagai gantinya? Dari perspektif apa? Untuk apa?

Dalam hal ini, proyek epistemik dekolonial di bidang warisan dan pengelolaannya tidak hanya berarti memutus dominasi kerangka "universal" pengetahuan-pemahaman Eropa/Barat, dan menerapkan praktik-praktik dekolonial yang didasarkan pada logika atau struktur pengetahuan yang secara historis telah terpinggirkan, diremehkan, bahkan dibungkam. Pilihan dekolonial di bidang warisan dan pengelolaannya, dalam masyarakat pascakolonial kita, juga berarti memutus dominasi pemikiran, kriteria, dan nilai-nilai tunggal yang dipaksakan dari atas (oleh pemerintah, elit, akademisi, dan pakar), mengakui validitas pengetahuan yang diperoleh melalui epistemologi lain, perspektif lain, ingatan lain, dan sebagainya, serta menghasilkan logika dan praktik dari pengalaman, gagasan, dan harapan tersebut.

Epistemologi-Espitemologi dari negara-negara Selatan (*Epistemologías del Sur*)

Terakhir, ide-ide tentang Epistemologi-Epistemologi dari negara-negara Selatan (ES, singkatan dalam bahasa Spanyol) karya Boaventura de Sousa Santos juga dapat memberikan wawasan tambahan yang relevan sebagai jalan keluar dari kolonialitas kekuasaan dan kolonialitas pengetahuan yang masih bertahan dalam masyarakat pascakolonial kita dan terus membentuk pendekatan-pendekatan dominan saat ini terhadap warisan. Di satu sisi, ES mengacu pada "upaya untuk memulihkan pengetahuan rakyat dan lokal yang [dimobilisasi dalam perjuangan-perjuangan] tidak pernah diakui oleh ilmu pengetahuan ilmiah atau akademis sebagai kontribusi yang relevan bagi pemahaman yang lebih baik tentang dunia" (de Sousa Santos, 2022, hlm. 52). Di sisi lain, konsepnya menegaskan bahwa "perjuangan sosial konkret biasanya menggabungkan berbagai jenis pengetahuan, seperti pengetahuan rakyat atau lokal dan pengetahuan akademis/ilmiah [dan] hubungannya dan perpaduannya berbagai jenis pengetahuan (ekologi pengetahuan) saling mengubah berbagai cara memahami karena mereka terlibat dalam dialog yang bertujuan memperkuat perjuangan sosial melawan dominasi" (de Sousa Santos, 2022, hlm. 52-53).

Boaventura de Sousa Santos (2022) berpendapat bahwa tidak bisa ada keadilan sosial global tanpa keadilan kognitif atau keadilan epistemik global karena telah terjadi epistemisida (*epistemicidio*) yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan modern yang eurosentris. Dia mengusulkan untuk melampaui "garis abyssal" (*la línea abismal*) yang membagi pengetahuan menjadi valid (ilmu pengetahuan Barat modern) dan tidak valid berdasarkan garis kolonial (de Sousa Santos, 2022). Dia

juga menyerukan agar pengetahuan lokal dan non-Barat tidak diremehkan dengan menganggapnya sebagai takhayul atau inferior. Dia mengajak kita untuk sebaliknya mempraktikkan "ekologi pengetahuan" (*ecologías de los saberes*) yang memungkinkan berbagai jenis pengetahuan untuk hidup berdampingan dan berinteraksi secara setara tanpa mencoba memaksakan mereka ke dalam satu hirarki tunggal (de Sousa Santos, 2022).

Gagasan de Sousa Santos dapat berguna untuk mengkritisi pandangan dan praktik dominan yang eurosentris dalam bidang warisan dan untuk menata ulang keduanya agar mereka menjadi lebih adil, inklusif dan dinamis. Pertanyaan bagi kita adalah—bagaimana kita menerapkan ES dan ekologi pengetahuan di bidang warisan? Dalam proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menilai dan mengelola warisan? Salah satu langkah adalah mengakui bahwa negara-negara Selatan dan kelompok-kelompok yang tertindas di negara-negara Utara memiliki sistem pengetahuan yang sah dan kaya di luar kerangka rasionalitas ilmiah Barat, namun selama ini telah secara sistematis terpinggirkan. Langkah lainnya adalah menghargai dengan sungguh-sungguh nilai sistem-sistem pengetahuan ini dan, pada saat yang sama, berhenti meremehkannya. Pada akhirnya, pengetahuan populer atau pengetahuan lokal harus ditempatkan pada tingkat yang setara dengan pengetahuan yang dihasilkan oleh logika Barat. Dengan demikian, perspektif Eropa akan menjadi salah satu dari sekian banyak sejarah lokal (inilah yang dimaksud dengan mengakui sifat provinsialisme dalam retorika modernitas dan kategori-kategori pemikirannya). Hanya dengan demikianlah akan kita membongkar hierarki jenis pengetahuan yang terbentuk selama masa kolonialisme Eropa dan yang masih sangat mengakar dalam masyarakat pascakolonial kita.

Dalam bidang warisan dan pengelolaannya, ES dan ekologi pengetahuan dapat diimplementasikan melalui dua langkah. Yang pertama adalah melampaui penilaian para ahli warisan mengenai apa yang bernilai dan apa yang tidak bernilai, berdasarkan kriteria estetika, sejarah, dan lain lain. Yang kedua adalah memberikan ruang bagi suara-suara lain sehingga pentingnya, fungsi sosial, dan nilai warisan bagi pihak-pihak lain seperti masyarakat setempat dipertimbangkan.

Kesimpulan

Seperti yang telah saya tulis tadi, pemikiran dekolonial (sebagaimana dikembangkan oleh Quijano, Mignolo, dan de Sousa Santos) adalah sebuah jalan keluar dari kolonialitas kekuasan dan kolonialitas pengetahuan yang terkait dengan perspektif dan praktek eurosentris yang dominan antara sains sosial dan praktisi di bidang warisan dan pengelolaannya. Dekolonialitas melibatkan beberapa hal. Pertama, ia mengharuskan profesional warisan dan akademisi menyadari bahwa warisan serta pekerjaan yang mereka lakukan bersifat politis. Proses penilaian dan penetapan artefak dan praktik sebagai warisan, serta alasan dan tujuan yang mendasari penetapan tersebut, merupakan tindakan politik. Ahli warisan dan akademisi yang berpartisipasi dalam prosesnya adalah agen perubahan yang memiliki privilese untuk mempengaruhi keputusan tentang apa yang ditetapkan sebagai warisan dan apa yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, profesional warisan dan akademisi yang terlibat berada dalam posisi untuk melanggengkan sistem dominasi atau menantangnya melalui ide, kerangka kerja, dan metodologi baru. Hanya dengan mengakui dan mempertanyakan peran kita

dalam mempertahankan atau melemahkan sistem dominasi yang dibentuk selama masa kolonial Eropa dan masih bertahan di masyarakat kita, kita bisa mengkontribusi untuk menghancurkan sistem-sistem dominasi yang diwariskan dan membangun sistem-sistem baru di atas reruntuhannya.

Kedua, teori dekolonial juga menuntut kita untuk mempertanyakan dan mendekonstruksi superioritas pengetahuan ilmiah, untuk melepaskan diri dari pemikiran yang dominan, serta mengakui keabsahan jenis pengetahuan dan cara-cara mengetahui lainnya dan menanggapinya dengan serius. Namun, perlu diingat bahwa ini bukan hanya tentang soal untuk memasukkan suara-suara yang beragam ke dalam sistem pengetahuan yang sudah mapan karena, menurut Mignolo, posisi darimana inklusi ditetapkan selalu merupakan tempat yang berkuasa. Hal ini memperkuat hubungan dominasi.

Ketiga, perspektif dekolonial juga melibatkan bahwa kita menyadari bahwa sistem pengetahuan lokal dan adat bukan sekadar "sumber data" bagi para ahli untuk ditafsirkan, melainkan sistem pemahaman dunia yang utuh. Akhirnya, pemikiran dekolonial memerlukan agar kita (profesional warisan dan akademisi yang terlibat) menciptakan ruang bagi kurasi bersama komunitas dan kewenangan bersama di semua tahap pekerjaan warisan. Tanpa melupakan bahwa ada pula risiko untuk meromantisasi dan mengidealkan hal-hal yang bersifat lokal.

Dengan mengacu pada gagasan Quijano, penting untuk diingat kembali bahwa kolonialitas kekuasaan dan dekolonialitas tidak hanya merujuk pada hubungan antara negara-negara Selatan dan negara-negara Utara (Barat dan non-Barat). Yang menjadi fokus utama di diskusi ini adalah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan terus berlanjut di dalam negara-negara pascakolonial antara berbagai pihak seperti akademisi, pemerintah, elit ekonomi dan politik, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat-masyarakat setempatnya.

Ucapan terima kasih

Artikel ini dipersiapkan setelah topiknya dipresentasikan di Seminar Internasional "*Reclaiming the Soul: History, Manuscript and the Future of Indonesian Cultural Heritage*" yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin Makassar pada tanggal 21-22 mei 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen Unhas yang mengajak saya untuk berpartisipasi di Seminar Internasional itu dan Admin yang membantu mewujudkan keikutsertaan saya. Khususnya saya berterima kasih banyak ke Dias Pradadimara dan Ilham Daeng Makkelo dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, dan Ibu Arni dari Kantor Urusan Internasional Unhas. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Haffata Zahra dan Azhari Syarif atas koreksi dan saran mereka terkait penggunaan kata-kata tertentu, preposisi, dan sebagainya. Saya bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan yang mungkin ditemukan oleh penutur bahasa Indonesia.

Referensi

de Sousa Santos, B. (2022). *Poscolonialismo, descolonialidad y epistemologías del sur* (Lilia Mosconi, Penerjemah). CLACSO-CES. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=2499&c=56.

Garbarino, M. A., Binaghi, E., Giacobone, P., González, C. S. G., Roude, G. & Salapé, N. E. (2024). Entrevista a Walter D. Mignolo: La opción decolonial introduce la

geopolítica del conocer, del sentir y del querer. *Revista de Filosofía (La Plata)*, *54*(1), e100, 1-20. https://doi.org/10.24215/29533392e100.

Gómez, P. P. (2015). Prefacio. Di W. D. Mignolo dan P.P. Gómez (Ed. Akademisi), *Trayectorias de re-existencia: ensayos en torno a la colonialidad/decolonialidad del saber, el sentir y el creer* (hlm. 7-26). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://monoskop.org/images/3/33/Mignolo_Walter_D_Trayectorias_de_re-existencia_ensayos_en_torno_a_la_colonialidad_decolonialidad_2015.pdf.

Karlström, A. (2015). Spirits and the ever-changing heritage, *Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief*, *9*(3), 395-399. https://doi.org/10.2752/175183413X13730330869112.

Mignolo, W. D. (2008). La opción descolonial. *Revista Letral*, *1*, 4–22. https://doi.org/10.30827/rl.v0i1.3555.

Mignolo, W. D. (2010). *Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad.* Ediciones del Signo. https://monoskop.org/images/9/9b/Mignolo_Walter_Desobediencia_epistemica_retorica_de_la_modernidad_logica_de_la_colonialidad_y_gramatica_de_la_descolonialidad_2010.pdf.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Di E. Lander (Peny.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (hlm. 201-242). CLACSO. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=247&c=8.

UNESCO. (t.t.a). *The Criteria for Selection*. https://whc.unesco.org/en/criteria/.

UNESCO. (t.t.b). *World Heritage List Statistics*. https://whc.unesco.org/en/list/stat.

Bacaan yang direkomendasikan

Lander, E. (Peny.). (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas.* CLACSO. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=247&c=8.

Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. *Tabula Rasa*, *9*, 71-101. https://doi.org/10.25058/20112742.340.

Lugones, M. (2010). Toward a Decolonial Feminism. *Hypatia*, *24*(4), 742-759. https://www.jstor.org/stable/40928654.

Maldonado-Torres, N. (2007). On the Coloniality of Being. Contributions to the Development of a Concept. *Cultural Studies*, *21*(2-3), 240-270. https://doi.org/10.1080/09502380601162548.

Maldonado-Torres, N. (2021). El giro decolonial. Di J. Poblete (Ed.), *Nuevos acercamientos a los estudios latinoamericanos: cultura y poder* (hlm. 193–222). CLACSO. https://doi.org/10.2307/j.ctv2v88dft.11.

Mignolo, W. D. dan Walsh, C. E. (2018). *On Decoloniality: Concepts, Analyitics, Praxis.* Duke Universit Press.

Schiwy, F. (2007). Decolonization and the Question of Subjectivity; Gender, Race, and Binary Thinking. *Cultural Studies*, *21*(2-3), 271-294. https://doi.org/10.1080/09502380601162555.

Segato, R. (2015). *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos: y una antropología por demanda*. Prometeo Libros.

Smith, L. T. (1999). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.